

ABSTRAK

Juriatma Joko Saputro. 2021. *Pemenuhan Fasilitas Hak Tuna Netra dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Banjarmasin.* Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (II) Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H.

Kata Kunci: Fasilitas, Tuna Netra, Pemilihan Umum.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari banyaknya penyandang disabilitas tuna netra mengeluh akan ketidaknyamanan saat pelaksanaan Pemilu seperti tidak adanya template braille bahkan dengan terbatasnya template braille suara mereka juga sudah tidak menjadi rahasia lagi karena dibantu pendamping mencoblos.

Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya pemenuhan fasilitas hak tuna netra dalam Pemilu tahun 2019, serta ingin mengetahui kendala yang mempengaruhi terhadap pemenuhan fasilitas hak tuna netra dalam Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara kepada 3 informan dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses *editing*, deskripsi dan mengumpulkannya kedalam bentuk matrik. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan mengarah pada landasan teori yaitu teori Hak Asasi Manusia (HAM), Pemilihan Umum (Pemilu), dan Penyandang Disabilitas.

Hasil penelitian adalah bahwa upaya pemenuhan fasilitas hak tuna netra dalam Pemilu tahun 2019 di Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh KPU Kota Banjarmasin sudah dilaksanakan, seperti mendaftarkan penyandang disabilitas tuna netra ke daftar pemilih Pemilu 2019, Menyediakan template braille, Melakukan sosialisasi yang bekerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas yaitu PPDI, dan menyediakan pendamping untuk membantu penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan fasilitas yang dilakukan oleh KPU Kota Banjarmasin masih kurang maksimal dimana banyak disabilitas yang tidak terdaftar dalam Pemilu tahun 2019, hak suara mereka tidak diperhatikan dan dianggap remeh, tidak adanya template braille, sosialisasi yang diberikan tidak menjelaskan pelaksanaan Pemilu khusus disabilitas, sehingga para penyandang disabilitas tuna netra masih kebingungan, dan banyak pendamping yang tidak memahami kebutuhan penyandang disabilitas. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan fasilitas hak tuna netra dalam Pemilu tahun 2019 adalah keluarga dan penyandang disabilitas masih tertutup serta aturan KPU yang tidak memperbolehkan mencoblos di rumah kecuali sakit. Berdasarkan hasil analisis peneliti terjadinya kendala penyandang disabilitas tertutup mengenai informasi diri dan enggan pergi ke TPS itu karena Pemilu yang diselenggarakan KPU Kota Banjarmasin kurang berkualitas dan tidak dapat menjamin hak politik penyandang disabilitas terutama tuna netra.